

## **PERLAWANAN BURUH TERHADAP DOMINASI PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DELI 1880-1930**

Oleh: Dwi Winandar, Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

### **Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlawanan yang dilakukan buruh perkebunan tembakau di Deli Pantai Timur Sumatera. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yakni heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh dari segi fisik maupun isi sumber, interpretasi yaitu penjelasan mengenai sumber yang telah diverifikasi untuk mendeskripsikan peristiwa agar mudah dipahami dan dimengerti, dan historiografi yaitu mensintesis data sejarah dalam bentuk karya sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja perkebunan tembakau adalah buruh Cina dan buruh Jawa yang berkerja secara kontrak. Sistem kontrak ini diperkuat dengan adanya ordonansi kuli. Tujuan ordonansi ini adalah mengatur hubungan antara pihak perkebunan dan buruh secara adil. Dalam praktiknya, ordonansi ini lebih membenarkan tindak sewenang-wenang perkebunan. Kesewenang-wenang dan ketidakadilan yang dilakukan perkebunan menimbulkan perlawanan dari pihak buruh dalam bentuk melarikan diri, desersi, membacok, dan mencuri.

**Kata Kunci:** Perlawanan, Buruh, Perkebunan, Deli

## ***LABOUR RESISTANCE AGAINST DOMINANCE OF TOBACCO PLANTERS IN DELI 1880-1930***

### **Abstract**

*The aim of this study is to give explicit description of labour protest in the tobacco plantation at Deli, East Sumatra. This research uses critical history methods, namely heuristics is the phase of collecting data or relevant historical sources, source criticism is the phase of reviewing the authenticity and credibility of sources obtained in terms of both physical and content sources, interpretation is an explanation of sources that have been verified to describe events so that they are easy to understand, and historiography is synthesizing historical data in the form of historical creation. The results of this study indicate that the majority of tobacco plantation workers are Chinese and Javanese labourers who work on a contract basis. This contract system was strengthened by the coolie ordinance. The aim of this ordinance is to regulate the relationship between the plantation and labourers fairly. In practice, this ordinance further justifies the despotic actions of planters. Abuses and injustices committed by planters have led to resistance from the workers in the form of escape, desertion, hacking and stealing.*

**Keywords:** Resistance, Labour, Planters, Deli.

## PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dari sistem tanam paksa ke sistem liberal berakibat semakin masifnya modal asing masuk ke Hindia-Belanda sehingga banyak perkebunan-perkebunan baru dibuka di Deli Pantai Timur Sumatera<sup>1</sup>. Perkembangan ini pun didukung oleh pembukaan Terusan Suez yang membuat kian pendek jarak antara Eropa dan Hindia-Belanda serta kawasan Asia Tenggara lainnya dan biaya angkut bahan-bahan baku ke Eropa menjadi murah. Peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi yang menimbulkan berbagai gerakan protes buruh.<sup>2</sup>

Perlawanan buruh ini disebabkan oleh kondisi buruh yang harus hidup dalam pengekangan dan tekanan dari pihak perkebunan sehingga memunculkan perasaan tidak puas, frustrasi, alienasi, dan kecewa. Perasaan itu yang memicu perlawanan buruh terhadap pihak perkebunan untuk merebut kembali haknya dan perbuatan butuh itu dianggap oleh pihak perkebunan sebagai tindakan destruktif dan kriminal. Perlawanan buruh tersebut biasanya dilakukan secara individu maupun kolektif, bersifat tertutup,

bersifat spontanitas, dan tidak berumur panjang.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan sosial, perlawanan buruh ini tidak menunjukkan ciri-ciri modern, seperti melalui organisasi dan dilandasi oleh ideologi-ideologi modern. Perlawanan buruh ini pun hanya dianggap sebagai sebuah gerakan yang mudah untuk ditangani oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Meskipun begitu, gerakan tersebut tetap meresahkan pemerintah dan pihak perkebunan.

## METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dibentuk untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.<sup>4</sup> Metode sejarah memiliki empat tahapan yang harus dilakukan oleh sejarawan, yakni pertama heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid II*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 20-35.

<sup>2</sup> Thee Kian Wie, "Kolonialisme dan Ekonomi Indonesia", dalam *Prisma* (No. 11, 1984), hlm, 49.

---

<sup>3</sup> James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, terj. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, Mien Joebhaar, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. xxiii.

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. xii.

terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, penjelasan mengenai sumber yang telah diverifikasi untuk mendeskripsikan peristiwa agar mudah dipahami dan dimengerti. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DELI 1880-1930

Akhir abad ke-19, Deli mulai dikenal oleh penduduk Cina, Jawa, dan pemodal di berbagai negara Eropa maupun Amerika. Wilayah ini yang dulu hanyalah hutan dan semak belukar (tanah tidak bertuan) diubah menjadi tanah yang menghasilkan tembakau yang bermutu tinggi bagi pemodal. Kemasyhuran Deli bermula dari keberhasilan Jacobus Nienhuys membudidayakan tembakau pada tahun 1863 di Deli.<sup>6</sup>

Beberapa tahun setelahnya jumlah perusahaan bertambah menjadi 22 perusahaan pada tahun 1872, 49 perusahaan pada tahun 1880, dan terus meningkat menjadi 148

perusahaan tembakau tahun 1888.<sup>7</sup> Pada kurun waktu kurang lebih 30 tahun, wilayah Pantai Timur Sumatera berubah menjadi suatu wilayah perkebunan besar.<sup>8</sup> Alhasil, para pengusaha mendapat keuntungan yang banyak dari usaha perkebunan tembakau.

Tahun 1890, harga tembakau mengalami penurunan yang cukup drastis dan mengalami krisis. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya krisis ini.<sup>9</sup> Pertama, pasar dunia mengalami kelebihan penawaran tembakau karena kenaikan produksi tembakau Deli. Kedua, kenaikan tarif bea masuk McKinley (tarif bea masuk impor tembakau ke Amerika Serikat) dari 35-75 sen menjadi 2 dolar per *pound* yang mengakibatkan para pedagang Amerika tidak tertarik untuk membeli tembakau.

Krisis ini mengakibatkan juga beberapa perusahaan perkebunan bangkrut dan perusahaan tembakau terus mengalami penurunan jumlah. Antara tahun 1890 dan 1894, tidak kurang dari 25 perusahaan tembakau dibubarkan. Tahun 1891, ada 170

<sup>5</sup> Tim Prodi Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah UNY, 2013), hlm.6.

<sup>6</sup> W. H. M. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Ooskust deel I*, (Amsterdam: Ooskust van Sumatra-Instituut, 1918), hlm, 171-176.

<sup>7</sup> Karl. J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*, terj. J. Rumbo, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 73.

<sup>8</sup> W. H. M. Schadee, *op.cit.*, *deel II*, 1919, hlm, 20 dan 181.

<sup>9</sup> Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture And Export Growth: an Economic History of East Sumatra, 1863-1942*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1977), hlm. 09.

perusahaan tembakau yang beroperasi, tetapi pada tahun 1927 hanya ada 70 yang tersisa.<sup>10</sup>

## B. PEREKRUTAN BURUH TEMBAKAU DI DELI

Sejak perkebunan tembakau mulai berkembang, para spekulasi tembakau mulai mendapat kesukaran untuk memperoleh tenaga kerja penduduk setempat. Keengganan maupun ketidaktertarikan penduduk setempat untuk bekerja di perkebunan tembakau dikarenakan lokasi perkebunan yang cukup jauh dari pemukiman warga setempat dan warga setempat telah memiliki lahan sendiri untuk digarap<sup>11</sup>. Untuk mengatasi hal ini, para pengusaha perkebunan tembakau mulai mendatangkan tenaga buruh dari luar wilayah Pantai Timur Sumatera.

Pada awal perkembangannya tahun 1865, pengusaha-pengusaha perkebunan tembakau mendatangkan buruh-buruh Cina. Mereka didatangkan dari *Straits Settlement* (Singapura dan Penang) melalui sistem kongsi. Pada tahun 1870, sistem tersebut digantikan dengan memperoleh langsung buruh Cina melalui mandor-mandor Cina (tandil)<sup>12</sup>. Usaha ini cukup berhasil sehingga

dalam tahun 1871 perkebunan di Deli sudah mempekerjakan kurang lebih 3.000 buruh Cina.

Dalam praktik pialang buruh, banyak makelar yang bertindak sewenang-wenang dan tidak jujur, seperti para *sinkheh* diajak *khehtau* untuk menonton pertunjukkan setelah itu ditahan dan dikirim ke Deli. Selain itu, para *khehtau* juga menipu *sinkheh* yang tidak mau pergi ke Deli dengan alasan bekerja di Johor namun mereka sadar telah dibawa ke Deli. Tidak hanya itu, para makelar juga mengirimkan buruh Cina yang tidak sehat.<sup>13</sup>

Pada akhirnya, para pekebun mulai mendatangkan tenaga buruh langsung dari Cina dengan mempekerjakan *laukheh* (buruh Cina lama). Para *laukheh* dikirim pulang oleh pihak perkebunan dan ditugaskan untuk membawa buruh-buruh baru dari daerah asalnya, tetapi modus yang dilakukan mereka untuk merekrut buruh tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan para makelar.<sup>14</sup>

Awal abad XX, buruh Jawa mulai menjadi sumber tenaga buruh yang dicari oleh pihak perkebunan. Ada beberapa faktor para pengusaha mulai mendatangkan buruh dari Jawa. Pertama, citra negatif perkebunan di Deli yang disebarkan oleh pers Cina membuat ketidakpastian buruh Cina yang akan dikirim.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>11</sup> Fatimah, "Pengaruh Sosial Ekonomi Perkebunan Tembakau terhadap Masyarakat di Sumatera Timur 1863-1900", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 1985), hlm. 51-52.

<sup>12</sup> Anthony Reid, "Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia", terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV, 2011), hlm. 196

---

<sup>13</sup> J. H. Bool, *Chineesche Immigratie naar Deli*, tt, tp, hlm. 02

<sup>14</sup> Sjafrin Sairin, "Kiat Perkebunan pada Masa Kolonial: Kasus Perkebunan Sumatera Timur", dalam *Prospektif*, (No. 1 & 2, 1993), hlm. 81.

Kedua, sifat buruh Jawa yang lebih penurut daripada buruh Cina. Terakhir, desakan pemerintah Cina untuk menaikkan upah buruh Cina.<sup>15</sup> Hal ini menyebabkan pengusaha lebih senang mengimpor buruh Jawa dan pada akhirnya menghentikan pengerahan buruh dari Cina pada tahun 1931.

Perekrutan ini terbukti berhasil dan berangsur-angsur mulai menggantikan buruh Cina. Pada akhir Perang Dunia I, pengerahan buruh Jawa ke Pantai Timur Sumatera naik melebihi jumlah buruh Cina. Lihat tabel 1.

Tabel 1.

Jumlah buruh Cina, Jawa, dan India di Pantai Timur Sumatera.

Tahun	Cina	Jawa	India
1883	21136	1711	1528
1893	41700	18000	2000
1898	50846	22256	3360
1906	53105	33802	3260
1913	53617	118517	4172
1920	27715	209459	2010
1930	26037	234554	1021

Sumber: Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economy History of East Sumatra, 1863-1942*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1977), hlm 39.

Dalam perekrutan buruh Jawa, para pengusaha perkebunan tembakau mendapatkannya melalui agen yang dikelola orang Eropa. Para agen mempekerjakan kalangan orang Jawa sebagai petugas lapangan untuk merekrut tenaga kerja. Orang

<sup>15</sup> Jan Breman, *Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatra Timur Pada Awal Abad ke-20*, terj. Koesalah Soebagyo Toer, ( Jakarta: Pustaka Grafitti, 1997), hlm. 64-67.

Jawa menyebut petugas lapangan dengan sebutan werek.<sup>16</sup>

Para werek berkeliling ke berbagai wilayah dan bekerja sama dengan para bupati dan carik untuk membujuk dan memengaruhi masyarakatnya supaya bekerja dengan werek. Dalam pialang ini, werek melakukan berbagai cara licik dalam merekrut buruh, seperti membujuk, menipu, memaksa, dan mengguna-guna.<sup>17</sup> Modus licik ini untuk mendapat bayaran yang lebih banyak. Untuk seorang calon buruh, werek mendapat bayaran senilai dengan bayaran 266 hari kerja para buruh di Jawa. Pada masa itu, buruh rata-rata menerima upah sebesar 30 sen per hari.<sup>18</sup>

Akibat dari sistem rekrutmen ini, para buruh Jawa yang bekerja di perkebunan Pantai Timur Sumatera berkembang sangat pesat. Jika dilihat dari tabel 1, tahun 1883, jumlah kedatangan buruh perkebunan didominasi oleh buruh Cina, sedangkan tahun 1913, jumlah buruh Jawa meningkat dua kali lipat dari buruh Cina. Tahun-tahun berikutnya, jumlah buruh Jawa terus membengkak dan buruh Cina terus berkurang.

### C. PEMBENTUKAN ORDONANSI KULI 1880

<sup>16</sup> Asal kata werek bersumber dari bahasa Belanda *werk* yang artinya bekerja. Lucia Juningsih, "Jawa Migran Jawa Melayu: Transformasi dan Adaptasi pada Masyarakat Jawa di Pantai Barat Semenanjung Malaya", *Disertasi*, (UGM: Yogyakarta, 2014), hlm. 123.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125.

<sup>18</sup> Sjafrri Sairin, *op.cit.*, hlm. 81.

Sebelum ordonansi kuli 1880 ditetapkan, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan mengenai hukum pidana bagi pribumi yang dikenal dengan *Algemeen Politie Strafreglement voor Inlander* (A. P. S. I.) atas prakarsa T. H. Kinderen yang tercantum dalam *Staatsblad* 1872 no. 111 pasal 2 ayat 27 A.P.S.I dan peraturan ini baru berlaku pada tahun 1873.<sup>19</sup> Peraturan ini telah mengubah sistem peradilan mengenai orang Cina, India, Arab, maupun Jepang (*oosterling*) dari wewenang sultan berpindah ke pemerintah Hindia-Belanda<sup>20</sup>. Semua perkara hukum diserahkan ke pengadilan pemerintah Hindia-Belanda.

Prosedur seperti ini dirasakan oleh pengusaha perkebunan sangat memakan waktu yang lama dan prosedurnya terlalu rumit<sup>21</sup>. Hal ini merupakan sebuah alasan para pengusaha supaya pemerintah kolonial memperbolehkan pihak perkebunan untuk mengontrol dan menghukum sendiri buruh mereka yang melanggar secara langsung.

Peraturan ini telah menimbulkan ketidaksetujuan oleh banyak pihak dan para

ahli hukum dan diyakini hanya menguntungkan pihak perkebunan, sedangkan para buruh berada dipihak yang dirugikan.<sup>22</sup> Peristiwa ini menyebabkan Mr. Mirandolle mengusulkan penghapusan mosi pasal 2 nomor 27 dalam sidang *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) pada 12 November 1875<sup>23</sup>, tetapi tuan de Vries berhasil mencegah putusan tersebut sehingga pembahasan sidang mengenai mosi Mirandolle ditunda karena menunggu laporan dan nasihat dari pemerintah Hindia-Belanda.<sup>24</sup>

Pada akhirnya pada 13 Juli 1880, peraturan khusus mengenai peraturan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan untuk perkebunan di Pantai Timur Sumatera secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda dan secara resmi berlaku pada 28 Oktober 1880.<sup>25</sup> Peraturan ini lebih dikenal dengan ordonansi kuli (*koelie ordonnantie*) yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja perkebunan di Pantai Timur Sumatera serta menetapkan sanksi bagi yang melanggar. Pidanaan yang tercantum dalam ordonansi ini sering dikenal dengan *poenale sanctie* (sanksi pidana).

---

<sup>19</sup> Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*, (Medan: Percetakan Waspada, 1977), hlm. 57.

<sup>20</sup> Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>21</sup> Tengku Lukman Sinar, Tengku Lukman Sinar Basarshah, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*, (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 2006) hlm. 48. Lihat juga Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 153.

---

<sup>22</sup> W. H. M. Schadee, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1992), hlm. 90.

<sup>24</sup> W. H. M. Schadee, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>25</sup> *Staatsblad* 1880 No. 133. hlm. 96.

Peraturan ini baru berlaku untuk seluruh wilayah Hindia Belanda pada 1889<sup>26</sup>. Dalam praktiknya, ordonansi ini diciptakan sebagai pembenar tindakan kesewenang-wenangan para majikan. Alhasil, para banyak kecaman datang dari kalangan orang Eropa sendiri tentang praktik ordonansi kuli ini.

#### **D. PEMBENTUKAN INSPEKTORAT TENAGA KERJA**

Pada tahun 1902, van den Brand menulis sebuah brosur yang berjudul *De Millioenen uit Deli* yang menggambarkan penderitaan yang dialami buruh perkebunan. Publikasi ini menimbulkan kehebohan di Pantai Timur Sumatera dan mendatangkan kemarahan pemerintah dan pengusaha swasta dan membangkitkan animo diskusi di Majelis Rendah. Alhasil akhir tahun 1902, Menteri Daerah Jajahan Belanda mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Rooseboom untuk menyelidiki kebenaran informasi yang ditulis van den Brand dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Dengan surat keputusan pemerintah tanggal 24 Mei 1903, Jaksa Tinggi J.L.T. Rhemrev ditugaskan melakukan penyelidikan administratif atas publikas brosur van den Brand. Pada tanggal 8 Juni 1903, Rhemrev datang ke Medan. Pada akhir tahun 1903, Rhemrev telah menyelesaikan tugas penyelidikannya dan pulang ke Batavia dan pada permulaan tahun 1904, Rhemrev

menyelesaikan laporannya.<sup>27</sup> Hasil penyelidikan Rhemrev membenarkan tuduhan van den Brand bahkan Rhemrev dalam penyelidikan menemukan keadaan buruh perkebunan tembakau yang lebih buruk dari pada yang ditulis oleh van den Brand.

Pada 18 Januari 1904, laporan Rhemrev sampai di hadapan Gubernur Jenderal Rooseboom kemudian dengan segera meneruskannya kepada Menteri Daerah Jajahan pada 31 Januari 1904. Laporan tersebut juga berisi rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani masalah yang terjadi di perkebunan, antara lain Penunjukan Pejabat khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan ordonansi kuli, Pembentukan Pengadilan Tinggi di Medan, Perbaikan upah kuli perempuan, Peningkatan kekuatan kepolisian.<sup>28</sup>

Pada 13 Juni 1908, secara definitif, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membentuk Inspektorat Tenaga Kerja (*Arbeidsinspectie*) Hindia Belanda di bawah Departemen Kehakiman sesuai keputusan kerajaan Belanda. Tugas Inspektorat Tenaga Kerja ini adalah mengawasi relasi hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam ordonansi kuli di wilayah peraturan tersebut berlaku dan mengawasi perekrutan pekerja kontrak di Hindia-Belanda.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 242-243.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

<sup>29</sup> *Staatsblad* 1908 No. 400, hlm 102.

<sup>26</sup> D. G. Stibbe, dkk, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, tp, 1919, hlm. 362.

## E. PERLAWANAN BURUH

Sejak perkebunan tembakau pertama dibangun hingga penghapusan *poenale sanctie*, wilayah perkebunan tembakau di Deli terus menerus muncul kegaduhan, perlawanan, dan kerusuhan yang semuanya itu cukup mengganggu kedamaian perkebunan dan pemerintah. Timbulnya perlawanan yang dilakukan buruh disebabkan perasaan tidak puas di lingkungan perkebunan akibat adanya kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan nilai yang terwujud sehingga menimbulkan rasa frustrasi, alienasi, dan kecewa.

Kurun waktu 1880-1908, perkebunan tembakau yang berdiri saat itu merupakan wilayah yang masih terisolasi jauh dari sorotan media sehingga laporan mengenai kondisi buruh sangat jarang diketahui dan didukung pula struktur dan peraturan buruh yang berlaku di perkebunan hampir tidak memungkinkan buruh melakukan pengaduan dan perlawanan. Informasi dan laporan yang keluar selalu diawasi sangat ketat oleh pihak perkebunan. Keterasingan ini melancarkan para pengusaha menjalankan perkebunannya tanpa gangguan.

Walaupun demikian, Berita tentang kondisi buruk dan insiden serangan buruh masih bisa diketahui lewat koran dan laporan dewan oposisi pemerintah seperti laporan van Kol dan van den Brand. Ada cukup bukti yang didapat melalui koran dan laporan oposisi yang menunjukkan bahwa para buruh

tidak menyerah terhadap kesengsaraan yang mereka alami. Berbagai perlawanan yang mereka lakukan sangat bervariasi bentuknya.

Satu contoh yang memberikan bukti perlawanan yang dilakukan buruh adalah melarikan diri. Van den Brand dalam bukunya *de Millioenen uit Deli* menunjukkan sebuah iklan di Deli Courant tahun 1899 tentang seorang buruh Jawa yang melarikan diri dari perkebunan Tebing Tinggi. Dalam iklan tersebut, buruh bernama Kasan berciri-ciri mata kiri buta, tinggi badan 161 cm, dan berumur 35 tahun melarikan diri dengan seorang perempuan dan dua anak kecil.<sup>30</sup>

Selain aksi yang disebutkan di atas, seorang buruh terkadang melakukan tindakan yang lebih ekstrem, yakni penyerangan secara langsung staf perkebunan. Pada tanggal 03 Februari 1899, seorang asisten perkebunan di Kalahoen Pinang diserang tanpa alasan oleh buruh Cina dan dibantu seorang temannya dengan menggunakan ujung cangkul sehingga jatuh ke tanah. Serangan tersebut tidak sampai merengut nyawa asisten karena asisten berhasil membela diri yang menyebabkan buruh takut dan melarikan diri.<sup>31</sup>

Selama tanggal 5-8 Agustus 1902, menurut van den Brand, hakim telah memvonis tiga puluh satu buruh dengan hukuman kurungan satu sampai tiga bulan.

---

<sup>30</sup> Van den brand, *De Millioenen uit Deli*, (Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1902), hlm. 40.

<sup>31</sup> *De Sumatra Post*, 03 Februari 1899.



Buruh yang dihukum satu bulan, antara lain orang Jawa bernama Sampan, Ketodrono, Projowikromo, Marsiman, Sarjan, Sarimowedji, Trowidjojo, Martoredjo, Mentowikromo, Mertomengolo, Midjan, Lasier, Diran, Sodikromo, Soerowikromo, Jasatirta, Kario sitiko, dan Radoen yang didakwa atas menolak bekerja; Najosomito, orang Cina Ho A Boe, dituntut karena pencurian; dan istri orang Jawa Ponikam, karena terlibat dalam pencurian. Vonis dua bulan hanya dijatuhkan kepada seorang Jawa bernama salam yang divonis karena pencurian. Sedangkan buruh yang divonis tiga bulan penjara, antara lain orang Cina Kim Fau Seng, Oh A Wang, dan Lim A Heng karena pencurian; orang Jawa: Soeswan, Amat, dan Radjio karena bermalasan; Kariodikromo, Ardjopawiro, dan Tingal karena melakukan desersi kerja yang berulang.<sup>32</sup>

Pada 1903, van Kol menunjukkan huru-hara yang terjadi di perkebunan bukanlah insiden yang jarang terjadi. Van Kol menyebutkan kejahatan yang terjadi pada tahun 1894 jumlah kejahatan adalah 148, tahun 1898 berjumlah 189 kejahatan, tahun 1900 berjumlah 236 kejahatan, dan tahun 1901 berjumlah 209. Lebih lanjut, van Kol menganjurkan kepada pihak perkebunan untuk memperbaiki upah buruh, mengganti

buruh kontrak dengan buruh bebas, dan penghapusan *poenale sanctie*.<sup>33</sup>

Dalam tahun 1910-1920, serangan buruh terhadap personil perkebunan semakin brutal. Koran-koran setempat banyak memberitakan penyerangan buruh terhadap staf perkebunan dengan menggunakan alat perkebunan. Peristiwa ini menimpa seorang asisten dengan inisial Mr. P. yang bekerja di perkebunan Dolok Baros, Deli Hilir. Sewaktu Mr. P. sedang melakukan pengawasan tiba-tiba seorang buruh Jawa menyerang dengan menggunakan cangkul dan mengalami luka di kepala. Dengan segera, Mr. P pergi ke rumah sakit.<sup>34</sup>

Di tahun yang sama, insiden yang dialami Mr. P menimpa seorang asisten muda A. W. van Ginkel yang diserang seorang buruh Jawa. Buruh Jawa memukulnya dari belakang dengan cangkul di bagian bahu dan jatuh ke jalan setapak. Namun, insiden ini dapat dicegah dengan kedatangan asisten perkebunan yang berlari mendekati teriakan van Ginkel.<sup>35</sup>

Insiden serupa juga menimpa seorang asisten Jerman di perkebunan Rotterdam. Waktu itu asisten Jerman menyuruh buruh Cina untuk mengembalikan cangkulnya. Buruh Cina merasa terganggu dengan

<sup>33</sup> H. van Kol, *Uit Onze Kolonien*, (Leiden: A. W. Sijthofe, 1903), hlm. 99.

<sup>34</sup> *De Sumatra Post*, 30 Mei 1910.

<sup>35</sup> *De Sumatra Post*, 22 November 1910.

<sup>32</sup> Van den brand, *op.cit.*, hlm. 40

perintah tersebut maka buruh Cina menyerang asisten dengan parang. Akan tetapi, asisten mengelak dan melarikan diri ke rumah administrator tanpa terluka. Asisten segera langsung melaporkan peristiwa itu. Keesokan harinya buruh Cina divonis penjara selama tiga bulan oleh inspektur<sup>36</sup>.

Alhasil ditahun berikutnya, tuan kebun melarang buruh membawa senjata tajam tanpa seizin majikan. Beberapa usaha lainnya pun dilakukan pihak perkebunan untuk mengatasi konfrontasi antara buruh dan asisten, seperti apel pagi menjelang fajar dihapuskan dan perintah kerja ke buruh diteruskan langsung oleh mandor untuk mengurangi serangan buruh terhadap asisten.<sup>37</sup>

Sebagian besar tindakan tersebut hanya meredam sementara serangan buruh. Pada tahun 1918, jumlah serangan terhadap asisten lebih besar dibandingkan tahun 1917. Seperti dalam tabel 2 di bawah<sup>38</sup>.

Tabel 2.

Jumlah serangan buruh terhadap asisten perkebunan tembakau di Pantai Timur Sumatera.

Suku	Tahun
------	-------

<sup>36</sup> *De Sumatra Post*, 26 Juli 1911.

<sup>37</sup> Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979*, (Yogyakarta: Karsa, 2005), hlm. 99-100.

<sup>38</sup> *Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie in Nederlands-Indie over de jaren 1917 en 1918*, (Weltevreden: Boekhandel Viseesr & Co, 1919), hlm. 20.

	1917	1918
Jawa	8 (kali)	15 (kali)
Sunda	7 (kali)	4 (kali)
Cina	1 (kali)	2 (kali)

Sumber: *Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie in Nederlands-Indie over de jaren 1917 en 1918*, (Weltevreden: Boekhandel Viseesr & Co, 1919)

Bulan April 1929, dilaporkan adanya 14 serangan lagi. Di mariendal, seorang asisten diancam buruh Cina, di Tanjung Kubu ada asisten yang diserang buruh yang berhasil dilumpuhkan dengan pistol. Di perkebunan Kloempang, empat belas buruh Cina dihukum 1 ½ sampai 8 tahun penjara karena mencoba membunuh pengawas. Pada bulan Mei, dua asisten dari perkebunan Sempali diancam dan diserang buruh.<sup>39</sup>

Di tahun-tahun berikutnya, situasi perkebunan semakin memburuk sehingga pengusaha perkebunan semakin waspada terhadap serangan buruh dan tidak menganggap remeh. Dalam tabel 3. sampai dengan tahun 1930, kemelut perburuhan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Jumlah seluruh serangan terhadap personil perkebunan hingga pengaruh depresi ekonomi mencapai Deli di pertengahan tahun 1930.

Tabel 3.

Jumlah serangan terhadap asisten perkebunan oleh buruh di Pantai Timur Sumatera

Tahun	Jumlah	Jumlah tewas
-------	--------	--------------

<sup>39</sup> Ann Laura Stoler, *op.cit.*, hlm. 145-146.

	serangan (kali)	(orang)
1920	26	0
1921	19	0
1922	26	1
1923	31	2
1924	19	3
1925	28	1
1926	27	0
1927	17	1
1928	43	2
1929	68	5
1930	61	2

Sumber: Diolah dari dua sumber. Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*, (Medan: Percetakan Waspada, 1977) dan Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011)

#### F. PEREDAMAN KEMELUT BURUH

Para tuan kebun sangat khawatir kemungkinan terjadinya peningkatan kerusuhan. Untuk menangani hal ini, tuan kebun mempekerjakan seorang informan yang berasal dari kalangan buruh, serangan buruh yang terus menerus membuat pihak perkebunan merasa terancam khawatir maka dari itu para anggota staf Eropa selalu membawa tongkat maupun pistol untuk mempertahankan diri.<sup>40</sup> Pada tahun 1928, sindikat perkebunan karet dan tembakau berkoordinasi dengan Biro Intelijen Hindia Belanda untuk memantau kegiatan politik di perkebunan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 165.

<sup>41</sup> Ann Laura Stoler, *op.cit.*, hlm. 116-118.

Pada tahun 1930, berita-berita tentang kuli pelarian, pemukulan, pelanggaran sepele dsb, menjadi jarang setelah pengaruh depresi mencapai Deli di pertengahan tahun. Respons perusahaan terhadap depresi tahun 1930 mencerminkan perubahan dalam hubungan kerja. Pada waktu yang sama, perkebunan menghapuskan buruh kontrak dan memulangkan ribuan buruh tiap bulannya ke Jawa karena perkebunan berada dalam kesulitan ekonomi. Hampir 50% dari buruh 336.000 buruh kontrak dihapuskan dan dipecat dalam waktu 3 tahun.<sup>42</sup>

Waktu itu pula, otoritas pemerintah Hindia-Belanda memainkan peran yang lebih besar dalam mengamankan kedamaian dan ketertiban. Pada permulaan tahun itu, pers pribumi disensor dan dilarang dari wilayah perkebunan, kecuali yang diizinkan perkebunan dan banyak sekolah di perkebunan ditutup untuk mencegah surat kabar mendapatkan akses ke staf Eropa maupun buruh Asia.<sup>43</sup>

#### KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan perkebunan maka kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Perkebunan-perkebunan mulai mendatangkan banyak buruh yang berasal dari luar Pantai Timur Sumatera. Pengusaha

<sup>42</sup> Ann Stoler, "Perceptions of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra", dalam *American Ethnologist* (Vol. 12, No. 04, 1985), 654.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 655.

perkebunan mulai mendatangkan buruh Cina melalui agen-agen buruh di Semenanjung Malaya tetapi merekrut buruh Cina mengalami hambatan. Akibat hal itu, para *ondernemer* mulai mendatangkan buruh dari Jawa. Dalam praktik pialang, banyak kecurangan yang dilakukan agen buruh untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam mendatangkan tenaga buruh.

Buruh-buruh yang dibawa ke perkebunan tembakau Deli diikat dengan sistem kerja kontrak mengikat biaya tinggi yang dikeluarkan. Pada akhirnya, kedatangan para buruh menciptakan suatu masyarakat perkebunan yang multietnis dan ikatan sosial yang didasarkan pada ikatan ketergantungan antara majikan dan buruh atas dasar hubungan kapital.

Berbagai strategi pun dilakukan pihak perkebunan untuk mempertahankan status quo dengan mendesak pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tenaga kerja pertama di Pantai Timur Sumatera yang dikenal dengan *koelie ordonnantie*. Dalam praktiknya, pasal-pasal ordonansi ini lebih membatasi kebebasan serta mengikat buruh dalam bekerja dan melindungi perilaku buruk majikan terhadap buruh.

Berbagai kecaman pun datang dari kalangan orang Eropa dan pribumi tentang praktik ordonansi kuli. Kekejaman ini mengundang perdebatan dalam Majelis Rendah dan menuntut untuk dilakukan penyelidikan perihal kondisi perburuhan dan

untuk menghentikan kesewenang-wenangan yang berlebihan dalam kontrak kerja. Alhasil, tahun 1908, dibentuk inspektorat tenaga kerja di bawah departemen kehakiman yang bertugas untuk mengawasi praktik ordonansi kuli.

Hal ini tidak menjamin situasi perkebunan menjadi aman dari kerusuhan. Sebaliknya, kesewenang-wenangan masih terjadi di perkebunan tembakau dan pada akhirnya buruh mulai melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan staf perkebunan. Hampir setiap tahun terjadi serangan dan agresi yang dilancarkan buruh terhadap asisten perkebunan.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kemelut buruh, seperti para tuan kebun mempekerjakan seorang informan dan tuan kebun mempersanjatai diri mereka dengan tongkat maupun pistol untuk melindungi diri. Di pihak buruh, ada pelarangan membawa senjata tajam dan penghapusan apel pagi. Dalam instruksi kerja, perintah asisten diteruskan mandor kepada para buruh.

Perlawanan kecil yang dilancarkan buruh terus meningkat hingga terjadi depresi ekonomi tahun 1930. Peristiwa depresi ekonomi mendesak para *ondernemer* menghapuskan ikatan kontrak buruh memulangkan secara selektif buruh setiap bulan dan menghapus *poenale sanctie*. Pada akhirnya, aksi kerusuhan terus berkurang di tahun-tahun setelahnya

## Daftar Pustaka

### Arsip

*Staatsblad* 1880 No.133.

*Staatsblad* 1908 No. 400

### Koran

*De Sumatra Post*, 03 Februari 1899

*De Sumatra Post*, 30 Mei 1910.

*De Sumatra Post*, 22 November 1910.

*De Sumatra Post*, 26 Juli 1911

### Buku, Tesis, dan Artikel

Breman, Jan, *Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatra Timur Pada Awal Abad ke-20*, terj. Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: Pustaka Grafitti, 1997.

Fatimah, "Pengaruh Sosial Ekonomi Perkebunan Tembakau terhadap Masyarakat di Sumatra Timur 1863-1900", *Tesis*, Yogyakarta: UGM, 1985.

Lucia Juningsih, "Jawa Migran Jawa Melayu: Transformasi dan Adaptasi pada Masyarakat Jawa di Pantai Barat Semenanjung Malaya", *Disertasi*, UGM: Yogyakarta, 2014.

Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*, Medan: Percetakan Waspada, 1977.

Mubyarto (dkk), *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Pelzer, Karl. J., *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947*, terj. J. Rumbo, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.


Reid, Anthony, *Menuju Sejarah Sumatra: antara Indonesia dan Dunia*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV, 2011


- \_\_\_\_\_, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011)
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid II*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Scott, James. C., *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, terj. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, Mien Joebhaar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Stoler, Ann, "Perceptions of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra", dalam *American Ethnologist* Vol. 12, No. 04, 1985
- \_\_\_\_\_, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979*, Yogyakarta: KARSA, 2005.
- Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture And Export Growth: an Economic History of East Sumatra, 1863-1942*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1977), hlm. 09.
- \_\_\_\_\_, "Kolonialisme dan Ekonomi Indonesia", dalam *Prisma* No. 11, 1984.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah UNY, 2013.
- Tengku Luckman Sinar, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*, Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 2006.
- Van den brand, *De Millioenen uit Deli*, Amsterdam: Hoveker & Wormser, 1902.
- Van Kol, H., *Uit Onze Kolonien*, Leiden: A. W. Sijthofe, 1903.
- \_\_\_\_\_, *Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie in Nederlands-Indie over de jaren 1917 en 1918*, Weltevreden: Boekhandel Viseesr & Co, 1919.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

Pembimbing

Reviewer,

  
Ririn Darini, M. Hum.  
NIP. 197411181999032001

  
H.Y. Agus Murdiyastomo, M. Hum.  
NIP. 195801211986011001